



Endhita Putri Purba¹
 Novita Ramdani²
 Wildah Veizy Jasmin³
 Sri Yunita⁴

PENGKAJIAN ULANG FONDASI PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEMILIH PEMULA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Abstrak

Pemilihan umum merupakan salah satu alat demokrasi yang mewakili kedaulatan rakyat. Ini adalah cara bagi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin yang memiliki visi, berkualitas, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kelompok pemilih yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah orang yang pertama kali memberikan suara mereka dalam Pemilu. Pemilu Untuk Pemilih Pemula yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (2013), pemilih pemula merujuk kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah mencapai usia 17 tahun atau yang belum mencapai usia 17 tahun tetapi sudah menikah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data. Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga temukan yang relevan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemilih pemula dituntut untuk melek terhadap politik, agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, maka diperlukan pendidikan politik sejak dini.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Pendidikan Politik.

Abstract

General elections are one of the democratic tools that represent people's sovereignty. This is a way for the people to elect representatives and leaders who have vision, quality, and are responsible for improving the welfare of the people. One interesting group of voters to investigate further is first-time voters. First-time voters are people who cast their votes for the first time in an election. Elections for New Voters published by the General Election Commission (2013), new voters refer to citizens who will exercise their right to vote for the first time in the General Election (Pemilu). They can come from Indonesian citizens (WNI) who have reached the age of 17 years or who have not yet reached the age of 17 years but are married. The approach in this research is library research. The method used in this research is the data analysis method. The general objective to be achieved in this research is to obtain valid inferences that can be re-examined based on the context. In this analysis, the process of selecting, comparing, combining and sorting various meanings will be carried out until the relevant ones are found. From the research results, it is concluded that novice voters are required to be politically literate, so that they can act as controllers of the running of the government in power. To create a politically literate society, political education is needed from an early age.

Keywords: Voting Behavior, Political Education.

^{1,2,3,4} Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 email: endhitaputri6@gmail.com, nnovitaramdani@gmail.com, wildahveizy@gmail.com

PENDAHULUAN

Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Tentu bukanlah hal mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap masyarakat. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor jenis kelamin, faktor keturunan sampai faktor mata pencarian.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Tujuan penulisan ini adalah agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Metode penulisan yang digunakan dalam paper jurnal ini adalah studi kepustakaan dengan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik pada para generasi muda atau yang sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik. (Rahman, 2018)

Partisipasi warga negara dalam kelompok masyarakat memiliki peran yang signifikan terhadap sistem politik suatu negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersinggungan dengan aspek-aspek politik. Politik adalah kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Contohnya, warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat harus bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan dan cita-cita negara. Contoh lainnya, warga negara terkena dampak langsung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kehidupan warga negara setiap harinya tidak lepas dari politik. Besarnya potensi pemilih pemula ini haruslah mendapat perhatian khusus sehingga mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh partai politik, salah satu pemanfaatan pemilih pemula adalah saat kampanye mereka kerap hanya dimobilisasi oleh parpol untuk mengikuti kampanye. Selain itu partai politik yang tujuannya hanya untuk menarik suara-suara sebanyak-banyaknya sering kali lupa untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula sehingga mereka sering melupakan untuk mengingatkan kepada pemilih pemula untuk benar-benar peduli dengan pemilu. Selain rentan dimanfaatkan oleh partai politik, pemilih pemula juga rentan akan menjadi golput, karena kepedulian mereka terhadap pemilu masih sangat kecil. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran masyarakat akan proses politik di lingkungannya. Salah satu upaya tersebut yaitu melalui riset tentang perilaku memilih/voting behavior. Karena dengan mengetahui tentang perilaku memilih/voting behavior pemilih pemula, atau kesadaran politik masyarakat, maka akan dapat dipastikan pola pendekatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam suatu wilayah.

METODE

Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan penelitian yang berupa kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti : dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah/artikel, jurnal, dsb. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteks nya. Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga di temukan yang relevan. (Adlini et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik

1. Pengertian politik

Politik memiliki makna cukup beragam. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Ada yang menyebutnya dengan seni dan ilmu pemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagian kekuasaan. Pada dasarnya politik berkenaan dengan perilaku manusia dalam mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secara etimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani “polis” yang artinya negara kota. Dari istilah polis ini berkembang konsep polites yang berarti warga negara dan konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Dari arti etimologis tersebut, politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan atau antara warga Negara pada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akan katanya adalah politics, yang bermakna kebijaksanaan (policy). Jika dilihat dari kedua bahasa tersebut, bahasa Yunani dan Inggris, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara kota. (Hasyim et al., 2020) Pengertian politik yaitu sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga Negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara.

Pengertian politik menurut para ahli di antaranya dikemukakan oleh David Easton (Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat”).

Affandi (1971) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara. Menurut Budiardjo (2008) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem (sosial) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan. (Budiardjo, 2008)

2. Pengertian Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang berkepribadian politik, agar memiliki kesadaran politik dan mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moral dalam mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan politik perlu diberikan kepada generasi muda, mengingat kondisi masyarakat yang beranekaragam, banyak diantaranya yang masih berada pada keterbelakangan dan ketidaktahuan politis serta pendidikan tersebut diperlukan untuk merangsang partisipasi aktif rakyat dalam gerak pembangunan”. (Amirullah, 2015)

Menurut Brownhill and Smart (1989), mengatakan bahwa: “pendidikan politik merupakan suatu cara untuk mempertahankan keadaan yang relatif stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang hendak dikejar dari penyelenggaraan pendidikan politik adalah terwujudnya keadaan masyarakat dan negara yang stabil, tetapi tetap dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya proses-proses demokrasi”. Sehingga pendidikan politik diberikan kepada orang dewasa agar para generasi muda ini dapat memahami politik dalam perannya sebagai kader-kader yang akan berkompetisi untuk membangun bangsa dan negaranya.

Menurut Kartono (1989), mengemukakan bahwa: “pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda, dengan jalan menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetisi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. Ini adalah pengertian pendidikan politik secara sempit, yang ditujukan kepada mereka yang merupakan kader partai atau kader politik.

Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

3. Bentuk dan proses pendidikan politik

Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Kavang (1998), itu terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus. (b) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).

Adapun bentuk sosialisasi politik berdasarkan jumlah peserta (audience) atau massa yang mengikutinya dibedakan menjadi bentuk umum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadi bila massa (audience) yang melaksanakannya tidak dibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yang terbatas jumlahnya dibatasi untuk kalangan tertentu. (Rahman, 2018)

Budaya Politik

Budaya Politik (Politic culture) merujuk pada pola hubungan yang terbentuk di antara individu, individu dalam kelompok, dan antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini mencerminkan ekspresi dari nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada dalam sistem politik suatu komunitas. Budaya politik, menurut Almond dan Verba (1990:20), merujuk pada cara individu menyatakan orientasi, sikap, dan nilai-nilai politik melalui sikap dan perilaku politiknya. Pengertian ini mencakup sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan semua komponennya, serta pandangan mereka tentang peran warga negara dalam sistem tersebut. Almond dan Verba juga menjelaskan bahwa warga negara biasanya mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, tindakan tokoh-tokoh politik, keputusan yang diambil oleh alat kebijakan politik, serta bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam sistem politik. Dari situ, pola orientasi masyarakat terhadap sistem politik dapat diidentifikasi, dan ini menjadi dasar untuk mengklasifikasikan berbagai tipe budaya politik. (Prof. Dr. Aim Abdulkarim & Dra. Neiny Ratnaningsih, 2012)

Budaya politik mengacu pada pandangan dan perilaku individu dan komunitas terhadap sistem politik. Orientasi politik ini terbagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat masyarakat dan tingkat individu, dan keduanya saling terkait. Almond dan Verba menjelaskan bahwa masyarakat mengenali dirinya dengan simbol-simbol lembaga-lembaga negara berdasarkan orientasinya. Sementara itu, menurut Almond dan Powell, orientasi individu terhadap sistem politik mencakup tiga aspek, yaitu:

1. Orientasi Kognitif

Budaya politik mencakup pengetahuan dan keyakinan mengenai sistem politik, misalnya : tingkat pengetahuan mengenai sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, dan lain sebagainya.

2. Orientasi Afektif

Budaya politik melibatkan emosi dan perasaan seseorang terhadap sistem politik, mencerminkan tingkat keterlibatan, keterikatan, atau penolakan yang dirasakannya.

3. Orientasi Evaluatif

Budaya politik mencakup evaluasi individu terhadap sistem politik, menunjukkan dedikasi terhadap nilai-nilai dan pertimbangan politik terkait kinerja sistem politik tersebut. (Dr. Thomas Tokan Pureklolon, 2021)

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu tanda dari modernisasi politik, dan peningkatan status sosial-ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih aktif. Di dalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap eksklusif untuk golongan elit tertentu. Sebagian besar petani, buruh, dan pedagang kecil tidak menyadari bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, sebaliknya, mereka juga memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui kekuatan politik jika mereka bersatu. Partisipasi politik pada dasarnya mengacu pada kehadiran dan keterlibatan warga dalam konteks politik, melibatkan mereka dalam berbagai proses politik mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan, bahkan mencakup kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Para ahli umumnya mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas individu atau kelompok dalam terlibat secara aktif dalam politik, baik melalui pemilihan pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas ini mencakup

pemilihan saat pemilu, partisipasi dalam kampanye partai politik, dan keanggotaan dalam partai politik atau organisasi masyarakat.

Menurut Miriam (1998:3), partisipasi politik merupakan implementasi dari penggunaan kekuasaan politik yang sah oleh masyarakat. Individu-individu dalam masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu melakukan hal ini karena mereka yakin bahwa dengan keterlibatan bersama itu, kepentingan mereka akan diwakili atau setidaknya diperhatikan. Artinya, mereka memiliki keyakinan bahwa partisipasi mereka memiliki dampak, yang dikenal dengan istilah efikasi politik. Dalam konteks sosiologi politik, tingkat partisipasi masyarakat dalam politik dianggap sebagai indikator keberhasilan pendidikan politik masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak partisipasi masyarakat, semakin baik pelaksanaan demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi ditunjukkan oleh banyaknya orang yang terlibat dalam pemahaman dan keterlibatan mereka dalam masalah-masalah politik serta partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan politik. (Miaz, 2012)

Pemilihan umum merupakan salah satu ekspresi dari nilai-nilai demokrasi, di mana pemilu menjadi bentuk penerapan prinsip dasar demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Dalam konsep demokrasi, pemilihan umum menjadi alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu keyakinan bahwa kekuasaan pemerintah harus memiliki batasan. Untuk memastikan pembatasan kekuasaan pemerintah, pergantian kekuasaan secara teratur dan teratur diperlukan agar masyarakat tetap harmonis. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi semua pihak dalam proses pergantian kekuasaan. (Rahmaniah, 2021)

Pemilih Pemula

Pemilihan umum merupakan salah satu alat demokrasi yang mewakili kedaulatan rakyat. Ini adalah cara bagi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin yang memiliki visi, berkualitas, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu kelompok pemilih yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah orang yang pertama kali memberikan suara mereka dalam Pemilu. Sebagaimana diuraikan dalam Modul I Pemilu Untuk Pemilih Pemula yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (2013), pemilih pemula merujuk kepada warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka dapat berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah mencapai usia 17 tahun atau yang belum mencapai usia 17 tahun tetapi sudah menikah.

Pengaruh penting dan signifikan dari pemilih muda dalam Pemilu telah dikenali oleh Partai Politik yang mengikuti Pemilu dan calon-calon mereka. Bahkan, persaingan untuk mendapatkan suara dari pemilih muda sudah dimulai sejak dua tahun terakhir, di mana banyak yang sudah mulai mempertimbangkan suara dari kelompok pemilih muda selama proses kampanye. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda ini. (Nur Wardhani, 2018)

Teori Perilaku Pemilih (Voting Behavior)

Secara sederhana voting behavior bisa didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum melalui serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X atautkah partai atau kandidat Y. Dalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dikenal dua macam pendekatan, yaitu aliran Columbia yang menggunakan pendekatan sosiologis dan aliran Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis. Selain itu terdapat pula pendekatan rational choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut.

Perilaku pemilih (voting behavior) merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Sedangkan menurut Haryanto (2000), Voting adalah: "Kegiatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan di daftar sebagai seorang pemilih, memberikan suaranya untuk memilih atau menentukan wakil-wakilnya". Perilaku memilih (voting behavior) menurut Jack C Plano adalah dimaksudkan sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu (Plano, 1985). Budiarjo (2001) mendefinisikan voting behavior sebagai

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya.

Menurut Asfar (2006) pendekatan perilaku memilih (Voting Behavior) selama ini selain didasarkan dua model atau pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan psikologi, ada pula pendekatan rasional. Untuk melihat kecenderungan perilaku pemilih pemula ada beberapa pendekatan yang dilihat menurut Dennis Kavanagh melalui bukunya yang berjudul *Political Science and Political Behavior* (Denis Kavanagh, *Political Science and Political Behaviour* (1983) menyatakan terdapat 3 model pendekatan di dalam perilaku memilih (voting behavior), yakni, pendekatan sosiologis, psikologis dan pemilih rasional. (Daniel Pasaribu, 2Dina Fadiyah, 3Nong Ayu Triyanti Utami Hakim & Anom, 2022)

a. Pendekatan Sosiologis

Mazhab sosiologis pada awalnya berasal dari Eropa yang kemudian berkembang di Amerika Serikat, yang pertama kali dikembangkan oleh Biro Penerapan Ilmu Sosial Universitas Colombia (Colombia's University Bureau of Applied Social Science), sehingga lebih di kenal dengan kelompok Colombia. Kelompok ini melakukan penelitian mengenai *The People's Choice* pada tahun 1948 dan *Voting* pada tahun 1952. Di dalam 2 karya tersebut terungkap perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Sosiologis kelompok masyarakat dan setiap kelompok dilihat sebagai basis dukungan terhadap partai tertentu. Pengelompokan ini bisa berdasarkan gender (perempuan dan laki-laki), usia (muda dan lanjut usia). Dapat pula berdasarkan organisasi formal dan informal. Pendekatan Pendekatan digambarkan peta sosiologis mengasumsikan bahwa preferensi politik, sebagaimana juga preferensi voting, adalah produk karakteristik sosio ekonomi, seperti pekerjaan, kelas, agama dan ideologi. Menurut Hadi (2006), pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis dikembangkan oleh mazhab Michigan Efriza (2012). The Survey Center di Ann Arbor yang memusatkan perhatiannya pada individu. Pendekatan psikologis, yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Center) lebih menekankan pada Pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan perilaku seseorang.

Mazhab ini pertama kali dipergunakan oleh Pusat Penelitian dan Survey Universitas Michigan (University of Michigan's Survey Research Centre) sehingga kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok Michigan. Menurut Richard Rose dan Lan MC. Alliser (1977) Pendekatan mazhab psikologis ini menekankan kepada faktor variabel psikologis sebagai telaah utamanya yakni, ikatan emosional pada suatu partai politik (identitas partai), orientasi terhadap isu yang berkembang dan orientasi terhadap kandidat. Pendekatan psikologis yang menggunakan identifikasi partai sebagai konsep kunci. Identifikasi partai berarti "rasa keterikatan individu terhadap partai", sekalipun ia bukan anggota. Munculnya pendekatan psikologis merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap beberapa ilmuwan politik terhadap pendekatan sosiologis.

c. Pendekatan Rasional (Rational Choice)

Pendekatan ini lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan ini antara lain Downs dengan karyanya "*An Economic Theory of Democracy*" (1957) dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan berjudul "*A Theory of the Calculus Voting*", (1962). Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik

tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon presiden maupun anggota parlemen. (Juanda et al., 2020)

SIMPULAN

Pemilih Pemula harus memiliki pengetahuan politik agar dapat berperan sebagai pengurus jalannya pemerintahan saat ini. Untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya politik, diperlukan pendidikan politik sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam memungkinkan pemilih pemula memahami politik melalui fasilitas pendidikan di sekolah. Politik dapat dipahami sebagai suatu proses, sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga suatu negara kota. Pendidikan politik merupakan bagian dari proses sosialisasi politik yang secara khusus membentuk nilai-nilai politik, menunjukkan bagaimana setiap masyarakat harus berpartisipasi dalam sistem politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>
- Amirullah. (2015). Pendidikan Politik Perempuan. In *Visipena Journal* (Vol. 7, Nomor 1). <https://doi.org/10.46244/Visipena.V7i1.299>
- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Daniel Pasaribu, 2dina Fadiyah, 3nong Ayu Triyanti Utami Hakim, 4syarif Fadillah Dan, & Anom, 5alfatri. (2022). Perilaku Pemilih (Voting Behaviour) Forum Betawi Rempug (Fbr) Dalam Pemilu Presiden Indonesia 2019. 14(2), 337–352.
- Dr. Thomas Tokan Pureklolon. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia : Sebuah Kajian. 10(1), 6.
- Hasyim, B., Sartibi, N., & Shiddiq Fauzan, H. (2020). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Budaya Dan Masyarakat*, 1(1), 1–6. www.lanmas.fisip.uniga.ac.id
- Juanda, Rahayu, N. Q., Amalia, I., & Rahman, A. (2020). Perilaku Memilih/Voting Behavior Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak 17 April 2019 Di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe). *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 4(1), 48–52.
- Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi. In *Unp Press Padang*.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/Jupiis.V10i1.8407>
- Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M. P., & Dra. Neiny Ratnaningsih, M. P. (2012). *Budaya Politik, Partisipasi Politik Dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia*. Sistem Politik Indonesia, 1.3.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44. <https://doi.org/10.24114/Jupiis.V10i1.8385>
- Rahmaniah. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Indonesia. 7, 1–5. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/yqzxx>